**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan uang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, terdiri dari :

1. Pemerintah pusat;
2. Pemerintah daerah;
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
4. Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan suatu organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenali posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada suatu periode tertentu.

**2.1.1.2 Komponen Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan sebagai berikut :

 “Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga, seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan Atas laporan Keuangan.”

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh entitas pelaporan adalah (1) laporan realisasi anggaran, (2) laporan perubahan saldo anggaran lebih, (3) neraca, (4) laporan operasional, (5) laporan arus kas, (6) laporan perubahan ekuitas, (7) catatan atas laporan keuangan.

**2.1.1.3 Fungsi Pelaporan Keuangan**

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, fungsi laporan keuangan sebagai berikut:

 “Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selam satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan egiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
5. Evaluasi Kinerja

Fungsi laporan keuangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

1. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehinnga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

1. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada pertauran perundang-undangan.

1. Keseimbangan Antargenerasi *(intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1. Evaluasi Kinerja

Mengvaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam pengguanaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mecapai kinerja yang direncanakan.”

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pelaporan keuangan yang dilakukan oleh entitas pelaporan adalah untuk kepentingan akuntabilitas, manajeman, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja.

**2.1.1.4 Tujuan Pelaporan Keuangan**

 Berdasarkan Peraturan Pemeritah No. 71 Tahun 2010, tujuan laporan keuanag sebagai berikut:

 “pelaporan keuanag pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumbar daya keuagan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakan mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuanag menyediakan informasi mengenai sumber dan pengguanaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit -Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.”

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguana laporan baik dalam menilai akuntabilitas, dan dalam pengambilan keputusan.

**2.1.1.5 Kualitas Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga memenuhi tujuannya (PP nomor 71 tahun 2010). Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni :

1. Relevan *(relevance)*

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan meliputi:

* 1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

* 1. Memiliki manfaat prediktif (*predictive vaue*)

Membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

* 1. Tepat waktu *(timeliness)*

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan.

* 1. Lengkap *(complete)*

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

1. Andal *(reliable)*

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

* 1. Penyajian jujur *(representational faithfullness)*

Informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yag secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

* 1. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.

* 1. Netralitas (*neutral)*

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

1. Dapat dibandingkan *(comparable)*

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

1. Dapat dipahami *(understandable)*

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas haruslah memenuhi ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi laporan keuangan. adapun karakteristik yang harus dipenuhi agar dapat menjadi laporan keuangan yang berkualitas adalah (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.

**2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Di Indonesia, selain terdapat standar akuntansi keuangan (SAK) yang digunakan dalam penyajian keuangan swasta juga terdapat standar akuntansi pemerintah (SAP) yang mengatur penyajian keuangan pemerintah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum (Halim, 2014). Selanjutnya menurut Nordiawan (2010) penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Bastian (2010) mengemukakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

“Persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, “standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 tahun 2013 “SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran”. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

**2.1.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

 Standar akuntansi sangat penting sebagai pedoman untuk mebuat laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian (Mardiasmo, 2007)

 Dengan ditetapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/ daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance).* Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rengka implementasi standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah (Nugraha, 2009)

 Dengan adanya standar akuntansi pemerintah (SAP) maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain:

1. Pemerintah (eksekutif)
2. DPR/DPRD (legislatif)
3. Investor
4. Kreditor
5. Masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah adalah sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya agar laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

**2.1.3 Sistem Pengendalian Intern**

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah harus menerapkan semua unsur dari sistem pengendalian intern. Untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus terhadap sistem pengendalian intern. Pemimpin instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dan efektifitas sistem pengendalian intern dengan cara melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internnya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola.

Berdasarkan terori diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah, pimpinan instansi harus selalu menerapkan sistem pengendalian intern dan selalu melakukan evaluasi untuk mengetahui kinerja dan efektifitas sistem pengendalian intern yang dilakukan.

**2.1.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

 Pengawasan internal merupakan satu dari sebagian kegiatan pengendalian intern yang memiliki fungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, audit, pelaporan telaah sejawat.

 Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan eyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

 Dijelaskan oleh mahmudi (2010: 20) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang didalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadahi. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen *(eksekutif)* dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadahi atas tercapainya tujua organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

 Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah menyatakan bahwa:

 “Sistem penngendalian intern adalah proses yang intergral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiaan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP dalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Sedangkan pengertian sistem pengendalian intern menurut permendagri No. 4 tahun 2008 pedoman pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) adalah sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadaan penyajian keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan efektifitas penyusunan laporan keuangan maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam kaitannya dengan efektivitas penyusunan laporan keuanag maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**2.1.2.2 Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintahan**

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintahan menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Unsur-unsur SPIP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya.

Lingkungan pengedalian terdiri dari:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemeritah terkait.
9. Penilaian Resiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko terdiri dari :

1. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
2. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan
3. Identifikasi resiko
4. Analisis resiko
5. Mengelola resiko selama perubahan
6. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari :

1. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
2. Pembinaan sumber daya manusia;
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. Pengendalian fisik aset;
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kerja;
6. Pemisahan fungsi;
7. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian pentig.
12. Informasi dan Komunikasi

Piminan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

1. Informasi
2. Komunikasi
3. Bentuk dan sarana komunikasi
4. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal melalui:

1. Pemantauan berkelanjutan
2. Evaluasi terpisah
3. Penyelesaian audit

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa didalam sistem pengendalian intern terdapat unsur-unsur yang harus dilaksanakan agar tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri dapat tercapai, unsur-unsur tersebut antara lain (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan.

**2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dalam menunjang penerapan *good governance*, pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi degan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Saat ini, pemanfaatan teknoogi informasi telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas harian secara optimal, akurat dan tepat waktu. Teknologi informasi adalah seperangkat yang membantu melakukan pekerjaan dengan unformasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Kadir, 2013). Teknologi informasi mengacu pada suatu item yang bermacam-macam dan kemampuan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran data serta informasi . komponen utamanya ada tiga yaitu komputer, komunikasi dan keterampilan (Simarmata, 2006)

 Teknologi informasi memiliki lima fungsi pokok yaitu mengumpulkan data, pengelolahan data, pelaporan, penyimpanan data, dan pengiriman data (Halim, 2002). Sitem informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi terutama sangat bergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan serta jenis-jenis keputusan yang dibuat oleh pengguna informasi, yang mungkin saja mereka merupakan para manajer, personil teknis dan spesialis, atau pegawai teknis administrasi. Informasi umum yang diperlakukan oleh manajer mengikuti pola yang berdasarkan pada sifat kegiatan pada suatu lapisan manajerial. Kebutuhan informasi oleh manajer cenderung bervariasi sesuai dengan lapisan hirarkinya di dalam organisasi, sebab sifat kegiatan manajerial cendrung berada pada berbagai lapisan serta dari sumber-sumber yang berbeda pula.

 Melalui PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), pemerintah telah mengamanatkan pelaksanaan SIKD baik pusat maupun daerah dalam rangka menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Penyelenggaraan SIKD diharapkan dapat menghasilkan data yang berkualitas yaitu, relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat dipertangguangjawabkan. Pengertian relevan adalah data yang digunakan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan, sedangan data yang akurat adalah data yang diperoleh menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Tepat waktu artinya data yang dibutuhkan tersedia sesuai dengan jadwal perumusan kebijakan. Dapat dipertanggungjawabkan artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

 Menurut (Suyanto, 2005), Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat diukur melalui penggunaan komponen berikut:

1. Perangkat Keras Komputer (*Hardware*)

Perangakat keras bagi suatu system informasi terdiri atas masukan dan keluaran. Sebagai unit penyimpanan file dan sebagainya, peralatan, penyimpanan data dan terminal masukan dan keluaran

1. Perangkat Lunak Komputer (*Software*)

Seperti system perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti system pengoprasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan system yang berbasis computer untuk memenuhi kebutuhan pengguna, contohnya: *e-commerce, DSS (Decision Support System), e-banking,* SAP, dan sebagainya.

1. Jaringan dan komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk mempermudah dan menjaga kualitas hubungan melalui internet. Sejak saat itulah perkembangan alat-alat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat.

 Dengan memanfaatkan segala teknologi informasi yang terdiri dari *hardware, softwar e, database*, jaringan dan lain sebagainya yang semakin canggih dan dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem informasi kian mampu membantu meminimalisir setiap faktor salah saji material mulai dari proses transaksional sampai pada penyajian laporan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat dan andal. Berdasarkan uraian diatas, indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil modifikasi penelitian, diantaranya: (1) penggunaan komputer (*Hardware* dan *Software*), dan (2) pengguanaan jaringan.

**2.2. Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Penerapan SAP, SPI, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**

 **Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama (Tahun) | Judul | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
| Kusumah (2012) | Pengaruh Penerapan Standar Akuantasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  | X : SAPY : Kualitas Laporan Keuangan | Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan | 1. Meneliti degan menggunakan variabel X: SAP, dan variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1. Variabel X yang berbeda yaitu SPI dan Pemanfaatan Teknologi Informasi2. Objek penelitian terdahulu yaitu Pemerintah Kota Tasikmalaya, sedangkan peneliti menjadikan obejek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin |
| Komarudin (2014) | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung | X : SAP dan SPIY : Kualitas Laporan Keuangan  | Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan | 1. Meneliti dengan menggunakan variabel X yang sama yaitu SAP, dan SPI dan menjadikan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel Y | 1. Variabel X yang berbeda dari penelitian terdahulu adalah Pemanfaatan Teknologi Informsi2. Objek penelitian terdahulu yaitu Pemerintah Kota Bandung, sedangkan objek penelitian dari peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin |
| Aprihani (2015) | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Penegendalian Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan  | X : SAP, SIP, dan kompetensi staf akuntansiY : kualitas laporan keuangan | Penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan | 1. Meneliti dengan menggunakan variabel X yang sama yaitu SAP, SPI, dan juga variabel Y yaaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1. Variabel X yang berbeda dari penelitian terdahulu adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi2. Objek penelitian terdahulu yaitu Pemerintah Kabupaten Jember, sedangkan objek penelitian dari peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin |
| Rahman (2015) | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keeuangan Daerah. | X : pemanfaatan teknologi informasi, penerapan SAKD, dan penerapan SAPY : kualitas laporan keuangan daerah. | Pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuanagn pemerintah daerah. | 1. Meneliti dengan menggunakan dua variabel X yang sama yaitu Penerapan Teknologi Informasi, Penerapan SAP, dan juga variabel Y yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1. Variabel X yang berbeda dari penelitian terdahulu adalah SPI2. Objek penelitian terdahulu yaitu Pemerintah Provinsi Riau, sedangkan objek penelitian dari peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin |

Sumber:data yang diolah 2018

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

 H4

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

H1

 H2

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Sistem Pengendalian Intern (X2)

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

 H3

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Sumber: daya yang diolah 2018

Berdasarkan gambar di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu penerapan SAP, SPI dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen pada BPKAD Kabupaten Banyuasin.

**2.4 Hipotesis**

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.

H2 : Terdapat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.

H3 : Terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.

H4 : Terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengen dalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan.

**2.4.1 Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut PP 71 Tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Mahmudi (2011) mengemukakan bahwa standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan SAP digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan (Darise, 2008).

Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Kusumah (2012) dengan hasil bahwa penerapan standar akntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan yaitu 10,057 % terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) .

**2.4.2 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

 Ditetapkannya sistem pengendalian intern dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dapat dipahami, tepat waktu, akurat, dan lengkap serta dapat diaudit. Jadi, dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik haruslah sesuai dengan PSAP dan SPI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya suatu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadahi bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya ( I Gusti Agung Rai, 2008:283)

Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Widari, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan 1,1 % terhadap kualitas laporan keuangan.

**2.4.3 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah dearah**

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008:135). Pemanfaatan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan. Ketepatwaktuan merupakan salah satu syarat atau indikator laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintah dapat meningkatkan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori-teori penghubung di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Rahman (2015) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan yaitu 2.3 % terhadap kualitas laporan keuangan

**2.4.4 Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan peryaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (Bastian,2010). Sementara Nordiawan (2009) mengumukakan penerapan standar akuntansi pemrintahan diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, andal, relevan, dapat dibandingkan, dapat dipahami, tepat waktu, akurat, dan lengkap serta dapat diaudit harus sesuai dengan PSAP dan SPI yang ditetapkan pemerintah. Kualitas laporan keuangan dangat dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya suatu sistem pengendalian internal. Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa “ untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus di lalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah dimana sistem akuntansi itu sendiri didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern. kemudian yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Hendarti (2011), teknologi informasi adalah sebuah kombinasi teknologi komputer dengan teknologi komunikasi yang memfasilitasi perolehan, pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan pembagian informasi dan isi digital lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan, dimana ketepatwaktuan adalah salah satu indikator suatu laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan beberapa teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2012) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya terkait dengan sistem pengendalian intern dilakukan oleh widari (2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. selanjutnya penelitan yang dilakukan oleh Rahman (2015) tentang pemanfaatan teknologi informasi yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.